

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Brexit Regret (Bregret) merupakan bentuk respon publik terhadap kebijakan Brexit yang dianggap telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, sosial, dan politik Inggris (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Bregret muncul di Inggris pada 2019 diawali dengan reaksi masyarakat Irlandia Utara yang khawatir akan adanya dampak yang dihasilkan dari kesepakatan baru antara UE dan Inggris Raya. Seiring dengan berjalannya waktu, Bregret semakin mempengaruhi masyarakat luas tidak hanya di wilayah bagian Irlandia Utara namun hampir diseluruh wilayah negara bagian Inggris Raya dan diaspora Inggris. Bregret mengacu pada fenomena dimana individu atau masyarakat Inggris Raya dan diaspora Inggris mengungkapkan penyesalan, ketidakpuasan, dan ketidakadilan terhadap keputusan meninggalkan UE (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Keluarnya Inggris dari UE telah menyebabkan hilangnya hubungan ekonomi yang menyebabkan semakin tingginya hambatan perdagangan, arus modal, dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini mempengaruhi output dan lapangan kerja tidak hanya di Inggris tetapi juga di 27 negara anggota UE lainnya (Chen, Ebeke, Lin, Qu, & Siminitz, 2018). Brexit juga mendorong pertimbangan ekonomi bagi diaspora Inggris. Warga Inggris yang tinggal di UE mengalami dampak keuangan akibat perubahan nilai tukar mata uang, pengaturan pensiun, dan akses terhadap layanan perbankan. Ketidakpastian yang timbul karena Brexit menyebabkan beberapa ekspatriat menilai kembali stabilitas keuangan dan prospek

jangka panjang mereka di luar negeri (Furseth, 2023). Sejak Brexit, hubungan Inggris-UE diatur oleh perjanjian yang berisikan penghormatan terhadap hak – hak warga negara, persaingan yang adil, dan perlindungan lingkungan (European Council of the EU, 2023). Namun, transisi menuju hubungan baru ini penuh dengan tantangan dan konsekuensi yang akan memakan waktu bertahun – tahun untuk terwujud (Chen, Ebeke, Lin, Qu, & Siminitz, 2018).

Bregret merupakan indikasi dampak dari pemberian informasi yang salah antara parlemen kepada masyarakat atas konsekuensi yang akan diterima pasca kebijakan diterapkan (Somin, 2016). Fenomena ini mempengaruhi adanya mobilisasi pada masyarakat yang tidak setuju dengan Brexit. Mobilisasi tersebut dilakukan dengan aksi demonstrasi masyarakat Inggris yang menyebut dirinya *anti-brexit* di depan Westminster dengan menggunakan atribut UE dan menyatakan dukungan mereka kepada UE (Fagan dan Kessel, 2023). Aksi protes yang dilakukan telah menjadi cara utama untuk sosialisasi, memberikan pendapat, dan menunjukkan keterlibatan politik mereka dalam lingkungan politik yang semakin terpolarisasi setelah referendum (Rone, 2023).

Semakin banyak orang yang menyesali Brexit dapat meningkatkan rasa ketidakpuasan masyarakat, yang mana dapat memicu gerakan sosial yang berupaya untuk menentang kebijakan atau mendukung adanya perubahan (Goodwin, 2022) dengan itu diharapkan prioritas politik juga dapat berubah, yang akhirnya gerakan sosial akan berfokus pada isu – isu terkait Brexit dan konsekuensinya (Smith, 2023). Ketika sentimen masyarakat terhadap Brexit meningkat, gerakan sosial juga memberikan tekanan pada elit politik untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat

dan berpotensi membatalkan keputusan atau merubah kebijakan terkait kerjasama Inggris Raya dan UE (Goodwin, 2022).

Menyikapi meningkatnya tindakan protes masyarakat terhadap pemerintah, juru bicara pemerintah Inggris menyatakan bahwa negara tersebut berupaya sepenuhnya mengoptimalkan manfaat dari Brexit, yang telah mengembalikan kedaulatan dan kemerdekaannya dengan menetapkan arah masa depannya sendiri. Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa mereka telah mengambil alih kendali perbatasan dan mengembalikan regulasi dalam negeri melalui pembuatan undang – undang secara independen (Kementerian Luar Negeri, 2023). Terkait hal ini, Partai Buruh dan Partai Konservatif belum menyampaikan pandangan mereka terkait wacana untuk mengadakan referendum mengenai kemungkinan kembali bergabungnya Inggris dengan UE, sesuai dengan keinginan masyarakat Inggris yang tercermin dalam hasil survei yang telah dilakukan (Kementerian Luar Negeri, 2023).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait Brexit beserta dampaknya sehingga memicu penyesalan pada masyarakat dan aksi gerakan sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Anand Menon dalam analisis publikasi artikel yang berjudul *Brexit is not 'done'* menjelaskan bahwa 16% dari pemilih yang mendukung keluarnya Inggris dari UE tidak mengetahui apa dampak yang akan dirasakan oleh Inggris di kemudian hari. Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa pelaksanaan Brexit dianggap kurang sesuai dengan ekspektasi awal pemerintah dan masyarakat. Selain itu, beberapa masyarakat turut memberikan pendapat bahwa pemerintah Inggris masih belum mampu menganalisis bagaimana dampak Brexit dalam jangka panjang. Masyarakat

menilai pemerintah terlalu gegabah akan keputusan yang dibuat sehingga menghiraukan kepentingan nasional Inggris (Menon, 2023).

Peneliti kedua, John Curtice dalam analisis nya yang berjudul *Public Attitudes on Brexit: Past, Present, and Future* menjelaskan bahwa pada awalnya, banyak pihak yang beranggapan Inggris akan mendapatkan kesepakatan yang bagus pasca kebijakan Brexit. Sebanyak 50% masyarakat dari survey yang dilakukan oleh Curtice menyatakan pandangan tersebut. Namun, ketika pemerintah Inggris mengumumkan perjanjian penarikan diri Inggris dari UE masyarakat merubah tanggapannya. Mereka beranggapan perjanjian perdagangan bebas Inggris akan terpengaruhi dalam aspek negatif setelah Inggris resmi keluar dari organisasi regional UE (Curtice, 2021).

Collins et.al., (2021) dalam analisis jurnalnya yang berjudul *A picture of regret: An empirical investigation of post-Brexit referendum survey data* juga memberikan pandangan dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan pendanaan UE, keberlanjutan lokasi pemukiman, jumlah penduduk wilayah setempat, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan GDP, menjadi faktor utama yang mempengaruhi penyesalan terhadap keputusan referendum. Dalam studi kasus ini, Collins memaparkan data survei terbaru yang melaporkan pilihan suara Brexit dan keinginan masyarakat untuk mengubah pilihan mereka pasca referendum (Collins et.al., 2021).

Penelitian terakhir oleh Drinkwater & Jennings (2021). Mereka menjelaskan bahwa hasil referendum dianggap oleh sebagian orang adalah sebuah kejutan, dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap bahwa Brexit belum seluruhnya dapat diaplikasikan dan akan memberikan dampak yang positif bagi

negara. Argumen umum juga diutarakan oleh media lokal Inggris yang menyebutkan bahwa banyak para masyarakat yang awalnya memilih agar Inggris keluar dari UE merasa menyesali keputusannya (Drinkwater & Jennings, 2021). Research gap dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana dampak negatif Brexit terutama dalam bidang ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri Inggris, dapat mempengaruhi aktivitas gerakan sosial di masyarakat Inggris, yang sering disebut sebagai aksi demonstrasi. Penelitian ini penting karena penelitian sebelumnya hanya menganalisis pandangan masyarakat Inggris terhadap dampak kebijakan luar negeri Brexit, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dinamika sosial yang lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini adalah : “Apa faktor yang *memicu reactionary social movement : British Exit Regret 2019 – 2023?*”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Secara Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam ranah ilmu pengetahuan sosial melalui penelitian ilmiah yang berfokus pada pengaruh kebijakan luar negeri terhadap aksi gerakan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat – syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Penelitian Secara Khusus

Berhubungan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan khusus dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan, menguraikan atau menganalisis konsekuensi dari Brexit yang menyebabkan adanya gerakan sosial masyarakat Inggris 2019 – 2023 khususnya bagi masyarakat Inggris yang berada di luar negeri dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi global.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 *The Regional Disintegration Theory*

Teori disintegrasi regional merupakan suatu kerangka yang menjelaskan dampak ekonomi dan politik dari pelepasan keanggotaan suatu negara dari organisasi internasional (Schimmelfennig, 2018). Keluarnya suatu negara dari pasar tunggal dan serikat pabean suatu organisasi telah menyebabkan perubahan dalam dinamika perdagangan, pola investasi, dan peraturan ekonomi (Lombaerde et.al., 2021). Disintegrasi regional dapat mengganggu rantai pasokan yang telah ada, meningkatkan hambatan perdagangan, dan mengubah kondisi akses pasar bagi dunia usaha, yang berpotensi mengakibatkan perlambatan atau kontraksi ekonomi di wilayah yang terkena dampak (Fernandez, 2023). Disintegrasi regional menimbulkan tantangan terhadap kerangka kelembagaan dan struktur pemerintah yang dibentuk oleh gerakan integrasi. Proses penarikan diri suatu negara dari organisasi internasional mengharuskan negosiasi ulang sejumlah perjanjian yang mengatur hubungan kedua belah pihak, termasuk perdagangan, keamanan, dan kerja sama peraturan (Grosse, 2016). Penguraian kerangka hukum dan sistem birokrasi yang rumit dan memakan waktu memicu kemunculan ketidakstabilan ekonomi negara (Lombaerde et.al., 2021).

Disintegrasi regional juga dapat menyebabkan fragmentasi politik di dalam dan diluar entitas yang terpecah. Keputusan meninggalkan suatu organisasi dapat memicu perpecahan politik suatu negara, dengan perdebatan mengenai kedaulatan, imigrasi, dan identitas nasional memainkan peran penting (Schmitter, Emeritus, Lefkofridi, 2015) . Keputusan yang dibuat juga berpotensi memperburuk hubungan diplomatik dan kerja sama negara, termasuk dalam keamanan, dan kebijakan luar negeri (Schimmelfennig, 2018). Teori disintegrasi regional menjelaskan bahwa adanya perubahan kebijakan negara menimbulkan konsekuensi sosial, termasuk perubahan pola migrasi, pertukaran budaya, dan sikap masyarakat (Grosse, 2016) . Keputusan negara untuk keluar dari suatu organisasi internasional memicu perdebatan mengenai kebijakan imigrasi dan hak kewarganegaraan yang mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai identitas, keragaman, dan kohesi sosial. Ketidakpastian suatu kebijakan juga berkontribusi terhadap kecemasan dan polarisasi dalam masyarakat, yang berpotensi memperburuk ketegangan dan kesenjangan sosial (Lombaerde et.al., 2021).

1.4.2 Relative Deprivation Theory

Relative Deprivation Theory adalah teori yang diasosiasikan dengan gerakan sosial pada masyarakat. Teori ini telah digunakan di beberapa ilmu sosial (Walker & Smith, 2002) terutama ekonomi, sosial (Yitzhaki, 1979) dan politik (Lichbach, 1990). *Relative Deprivation Theory* menjelaskan bahwa adanya gerakan sosial yang terjadi disebabkan adanya ketidakadilan dan kekurangan yang dirasakan oleh suatu individu atau kelompok masyarakat (Orum, 1974). Individu atau kelompok masyarakat ini menganggap bahwa ada permasalahan dalam lingkungan sosial mereka sehingga menyebabkan mereka merasa kurang karena

disebabkan oleh sesuatu hal (Tilly & Tarrow, 2007, Tarrow, 2011, Goodwin & Jasper, 2012). Permasalahan sosial yang muncul akhirnya menyebabkan adanya gerakan sosial yang dibuat oleh masyarakat sebagai aksi mengutarakan amarah dan frustrasi yang ada dalam individu atau kelompok masyarakat tersebut (Tarrow, 2011: 9). *Relative Deprivation Theory* dalam konteks hubungan internasional dan gerakan sosial menyatakan bahwa aksi kolektif masyarakat seringkali muncul ketika entitas merasa dirugikan dibandingkan dengan entitas lain dan melihat adanya peluang untuk mengambil tindakan kolektif guna mengatasi ketidakadilan dan kekurangan yang dirasakan (Davies, 1962).

Berdasarkan pandangan teori ini, pergerakan sosial lebih besar terjadi ketika dimana terdapat ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait pembangunan yang diikuti dengan kontraksi ekonomi. Ini menghasilkan ekspektasi masyarakat yang tidak terpenuhi atau ekspektasi masyarakat yang terpenuhi namun dalam jangka waktu yang lambat (Tobar, 2021). Teori ini juga menyatakan bahwa individu lebih cenderung terlibat dalam tindakan kolektif atau mengungkapkan ketidakpuasan ketika mereka merasakan kekurangan dan ketidakadilan dengan situasi mereka saat ini (Evans & Tilley 2017). Gerakan Sosial yang terlahir dari deprivasi relatif seringkali menganjurkan perubahan atau reformasi kebijakan tertentu. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan dan ketidakadilan yang dirasakan dan menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih adil (Ishkanian & Glasius, 2018).

Rasa kekurangan dan ketidakadilan ini berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif diantara individu - individu yang mempunyai keluhan yang sama. Individu yang merasa dirugikan akan melakukan protes, demonstrasi, atau bentuk

perlawanan lainnya untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap suatu perubahan sosial atau kebijakan (Ishkanian, 2018). Gerakan yang berakar pada deprivasi relatif biasanya melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong reformasi dan perubahan kebijakan yang ada untuk memperbaiki kekurangan dan ketidakadilan yang dirasakan dalam hal ekonomi, politik, dan sosial (Grasso & Giugni 2016).

1.4.3 *Social Movement Theory*

Gerakan sosial menjadi fokus perhatian para literatur akademis dunia dalam konteks globalisasi politik dunia sejak berakhirnya perang dingin. Teori gerakan sosial dalam hubungan internasional mengkaji peran dan dampak gerakan sosial di panggung global. Gerakan sosial dicirikan oleh mobilisasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mendorong perubahan sosial, politik, dan ekonomi (Davies, 1962). Kontribusi progresif gerakan sosial tidak lepas dari potensi regulasi yang dikaitkan dengan asosiasi sipil dan jaringan advokasi (Eschle & Maiguashca 2007), penyediaan mobilisasi masyarakat yang demokratis secara langsung dan terhubung (Juris, 2004: 345), dan proses pemberontakan oposisi (Germain & Kenny, 2005: 8). Aksi protes sebagian besar berawal dari ketegangan dan transisi masyarakat akibat dari permasalahan politik, sosial, urbanisasi, dan permasalahan ekonomi sehingga menimbulkan adanya ketidakpuasan atas bentuk kehidupan saat ini. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk membuat aksi kolektif demonstrasi yang disebut dengan gerakan sosial (Smelser, 1962).

Pada tingkat analisis yang paling umum, gerakan sosial ditentukan oleh jumlah dan kategori sosial dengan hubungan sosial, jaringan interpersonal, struktur

komunitas dan organisasi formal dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mengembangkan isu - isu yang dapat ditindaklanjuti (Tilly, 1978). Kekuatan yang memotivasi tindakan kolektif, selain adanya ketidakpuasan dan agitasi, adalah keinginan dan harapan terhadap skema atau sistem kehidupan yang baru (Blumer, 1969). (Gurr, 1970) berpendapat bahwa, ketika perubahan sosial menyebabkan masyarakat mengalami 'kekurangan relatif', maka terjadinya protes dan pemberontakan akan meningkat secara signifikan. Perasaan kekurangan relatif timbul dari perbandingan kelompok satu dengan kelompok lain (Routledge, 1966). Para pengunjuk rasa menurut pendekatan gerakan sosial adalah individu - individu yang frustrasi, dirampas haknya, disintegrasi, dan terpinggirkan dikarenakan dampak krisis ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang tidak adil (Klandermans & Stekelenburg, 2009).

1.4.4 Reactionary Social Movements Theory

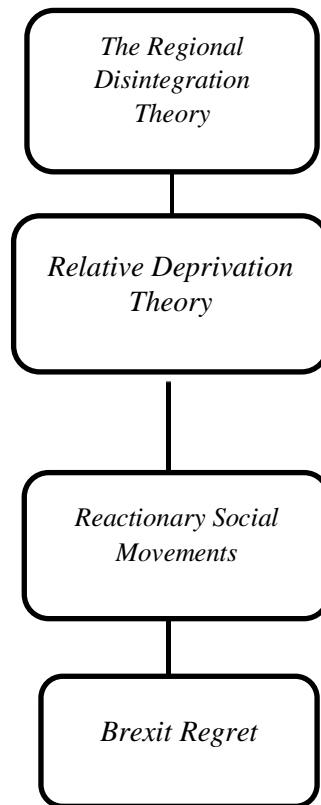
Teori gerakan reaksioner adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menghalangi adanya perubahan sosial atau membalikan perubahan sosial yang sudah terjadi (University of Minnesota Libraries, 2010). Gerakan reaksioner seringkali ditandai dengan keinginan untuk kembali ke keadaan sosial sebelumnya (Rothwell, 2023). Gerakan reaksioner dapat dikontraskan dengan gerakan progresif, yang mendukung tatanan sosial baru dan perubahan sistem politik, ekonomi, atau sosial (University of Minnesota Libraries, 2010). Beberapa aspek penting dalam gerakan reaksioner meliputi upaya merubah kembali perubahan sosial yang diakibatkan dari suatu penyebab (University of Minnesota Libraries, 2010) dan adanya gerakan yang dikaitkan dengan ideologi politik konservatif (Rothwell, 2023). Gerakan reaksioner dapat digambarkan dengan gerakan politik

yang bertujuan untuk mempertahankan struktur atau merubah kembali perubahan sosial yang telah dilakukan.

Gerakan reaksioner merupakan subjek kajian ilmu politik yang mana, dalam ilmu politik seorang reaksioner atau reaksionis adalah orang yang menganut pandangan politik yang mendukung kembalinya status politik atau sosial sebelumnya (Rothwell, 2023). Secara umum, gerakan reaksioner diyakini dapat digunakan untuk menghalangi perubahan sosial atau mengembalikan perubahan sosial yang telah dilakukan (University of Minnesota Libraries, 2010). Dengan melakukan hal ini, mereka akan menggiring opini publik yang memiliki kesamaan pendapat mengenai adanya perubahan sosial yang terjadi (Parker, 2016). Gerakan reaksioner juga menggunakan propaganda dalam bentuk media untuk menyebarkan opini mereka dan mendapatkan opini publik dalam jumlah lebih banyak (Parker, 2016).

Gerakan reaksioner dalam hubungan internasional dapat dipahami sebagai gerakan politik yang bertujuan untuk menghalangi perubahan sosial atau membalikkan perubahan sosial yang telah dilakukan dalam konteks internasional (MacKay & LaRoche, 2018). Gerakan ini mungkin menganjurkan pemulihan keadaan sosial dari adanya gejolak sosial yang disebabkan oleh suatu hal atau mempertahankan institusi yang ada sebelumnya (Rothwell, 2023). Gagasan reaksioner dinilai telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah aksi gerakan sosial dalam politik kontemporer (MacKay & LaRoche, 2018).

1.5 Sintesa Teori



1.6 Argumen Teori

Penerapan Brexit oleh pemerintah Inggris, yang didorong oleh pendekatan disintegrasi regional, telah menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap negara tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan perdagangan luar negeri karena pembatasan baru dan meningkatnya ketidakpastian mengenai hubungan perdagangan dengan UE. Menurunnya angka Pound sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi, telah melemahkan kepercayaan investor dan merugikan perekonomian domestik. Selain itu, kebijakan - kebijakan ini telah menghambat akses bagi ekspatriat asal Inggris, membatasi mobilitas, dan kemudahan mereka untuk bekerja dan tinggal di luar negeri. Menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat, warga Inggris menyampaikan keprihatinan mereka melalui gerakan “Bregret” dan menyesali keputusan Brexit dan dampak buruknya terhadap kehidupan sehari - hari dan prospek perekonomian

negara. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut dan keinginan untuk menilai kembali kesejahteraan ekonomi dan sosial Inggris.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam kasus ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk memahami fenomena terkait dengan pengalaman subjek penelitian, seperti, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode ini dilakukan melalui deskripsi menggunakan kata - kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alami, dengan memanfaatkan suatu metode alamiah (Moleong (2005:6). Metode kualitatif dapat dijelaskan sebagai pendekatan dalam penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan tindakan manusia (Afrizal, 2016:13).

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun hasil rekayasa manusia. Fokus utamanya adalah pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata (2011: 73)). Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan kemudian menganalisis faktor apa saja yang membuat masyarakat Inggris merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintah terkait kebijakan luar negeri mereka yaitu Brexit. Yang mana, faktor – faktor tersebut merupakan pemicu aksi demonstrasi masyarakat Inggris untuk meluapkan amarah dan frustrasi yang mereka rasakan dimulai dari tahun 2019 – 2023.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pembahasan faktor yang berkontribusi pada fenomena *Brexit Regret* sebagai pemicu aksi gerakan sosial masyarakat di Inggris Raya dan bagaimana pergerakan oposisi masyarakat Inggris dalam melakukan aksi gerakan sosial. Penelitian ini difokuskan pada 2019 – 2023. Pada periode 2019, merupakan aksi demonstrasi pertama yang dilakukan oleh masyarakat Inggris raya sebagai upaya mereka dalam mengatasi dampak yang akan terjadi pasca Brexit. Tahun 2023, adalah batas tahun penelitian yang mana pada tahun itu terdapat gerakan oposisi masyarakat yang semakin meningkat karena masyarakat sudah tidak mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang terganggu, adanya gejolak sosial yang timbul pada masyarakat, dan ketidakstabilan politik domestik dan luar negeri Inggris.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dengan merujuk kepada variasi metode penelitian yang tersedia, peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti dokumen, naskah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, atau buku yang relevan sebagai sumber utama penelitian. Proses penelitian dilakukan secara sistematis untuk menghimpun, mengolah, dan menyimpulkan data (Sari, (2020:41)). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengeksplorasi suatu buku. Metode ini mencakup identifikasi dan studi terhadap sumber - sumber yang menyediakan informasi faktual atau pandangan para ahli terkait pertanyaan penelitian. Hal ini merupakan integral dari metode penelitian lainnya dalam suatu periode tertentu (George, 2008).

Penelitian kepustakaan melakukan teknik pengumpulan data melalui jurnal artikel, media massa, esai, buku ilmiah, dan beberapa artikel publikasi (Creswell, 2002). Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang berkaitan dengan faktor pemicu meningkatnya Brexit Regret 2019 - 2023. Data dan tinjauan literatur yang didapatkan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah dan argumentasi teori.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan metode analisis isi (Arikunto, 1992). Analisis isi adalah suatu pendekatan yang melibatkan berbagai prosedur untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dari pernyataan yang terdapat dalam sumber. Pendekatan analisis isi yang diterapkan pada penelitian ini merujuk pada teori Weber. Menurut Weber, analisis isi merupakan suatu metode sistematis yang mengidentifikasi karakteristik khusus yang terkandung dalam pesan dan diilustrasikan melalui teks (Mihailescu, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti memulai dari merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, dilanjutkan dengan menentukan metode pengumpulan data, dan tahapan terakhir adalah menginterpretasikan makna hasil penelitian.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika berikut :

- Pada BAB I Berisikan pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesis teori, argumen teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

- Pada BAB II akan dijelaskan mengenai pengaruh dari Brexit pada ekonomi, politik luar dan dalam negeri Inggris. Serta reaksi masyarakat di Inggris dan diaspora Inggris sebagai pihak terdampak utama sehingga memicu fenomena Brexit Regret yang menimbulkan aksi gerakan sosial masyarakat Inggris sebagai respon terhadap konsekuensi negatif dari Brexit.

- Pada BAB III akan menjelaskan mengenai bentuk aksi gerakan sosial masyarakat Inggris pada tahun 2019 - 2023 sebagai upaya perubahan akibat konsekuensi negatif Brexit.

- Pada IV merupakan penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.